



STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENGHADAPI ANCAMAN PAHAM ANARKO SINDIKALIS

Strategy Provincial Government of West Java In Facing Anarcho-Syndicalist Threat

Talolo Muara, Yusuf, Triyoga Budi Prasetyo

Program Studi Peperangan Asimetris,
Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan
talolo.muara@idu.ac.id

Abstract (English) – *The peaceful demonstration of workers at the Government of West Java office was injured with vandalism and anarchism by anarcho-syndicalist actors. The development of information technology made it easier to spread provocation and anti-government narratives thus giving rise to mass support for the action. However, the strategy of the Provincial Government of West Java has not been effective in preventing the infiltration of anarcho-syndicalism using asymmetric tactics. The purpose of this research is to analyze the threat of anarcho-syndicalism from an asymmetric warfare perspective and the strategy Provincial Government of West Java in facing the anarcho-syndicalism threat from an asymmetric warfare perspective in Mayday 2019 in Bandung City. The research method used is a qualitative research method with a case study research design. The technique of data collection was carried out through open and covert observation, semi-structured interviews, and document analysis. The results show that anarcho-syndicalism is an asymmetrical threat that embedded anti-government attitudes through social media, vandalism, and youth culture trends. Actors and sympathizers of anarcho-syndicalism can be used by interested persons or groups who oppose the government because not only originated from workers but also student, and marginalized communities. The strategy Provincial Government of West Java strategy was carried out through intelligence detection, pre-emptive, preventive, law enforcement, and restoration. This research concludes that the Strategy Provincial Government of West Java was not effective in dealing with anarcho-syndicalist movements which are disorderly, and constantly changing. and establishment of anarcho-syndicalism sympathizers unpredictable.*

Keywords: *asymmetric threat, the strategy of the government, anti-government, anarcho-syndicalism, mayday 2019.*

Abstrak – Aksi damai demonstrasi buruh di kantor pemerintahan Jawa Barat dicerai oleh aksi vandalisme dan anarkis yang dilakukan aktor anarko sindikalis. Perkembangan teknologi informasi mempermudah penyebaran provokasi dan narasi anti pemerintah sehingga memunculkan dukungan dari simpatisan massa aksi. Namun demikian, strategi



Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum efektif dalam mencegah infiltrasi aktor anarko sindikalis yang menggunakan taktik asimetris. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis ancaman anarko sindikalis dalam perspektif peperangan asimetris dan strategi pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi ancaman paham anarko sindikalis dalam perspektif peperangan asimetris pada peringatan hari buruh 2019 di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terbuka dan observasi tersamar, wawancara semi terstruktur, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anarko sindikalis merupakan ancaman asimetris yang menanamkan sikap anti pemerintah melalui media sosial, vandalisme, dan budaya tren anak muda. Aktor dan simpatisan anarko sindikalisme kemudian dapat dimanfaatkan oleh orang atau kelompok berkepentingan yang berseberangan dengan pemerintah karena simpatisan tidak hanya berasal dari buruh tetapi juga pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang terpinggirkan. Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui deteksi intelijen, pre-emptive, preventif, penegakkan hukum, dan pemulihan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum efektif dalam menghadapi gerakan anarko sindikalis yang liar, taktik berubah-ubah, dan terbentuknya simpatisan anarko sindikalis tidak terprediksi.

Kata Kunci: ancaman asimetris, strategi pemerintah, anti-pemerintah, anarko sindikalisme, hari buruh 2019

Pendahuluan

Pertahanan Indonesia diselenggarakan dalam sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menghadapi ancaman militer, non-militer, dan hibrida. Dipersiapkan secara dini merujuk pada pembangunan sistem pertahanan yang berkelanjutan dan terus-menerus untuk menghadapi berbagai ancaman baik militer, non-militer, maupun hibrida. Kemudian, pertahanan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan terarah merujuk pada kesatuan komando sehingga membentuk satu totalitas pertahanan negara (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Warga negara beserta kesadaran terhadap hak dan kewajibannya merupakan subjek pertahanan untuk mencapai kemajuan dan kemandirian bangsa. Sistem pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer



dan pertahanan nirmiliter untuk membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat, disegani, dan memiliki daya tangkal tinggi.

Pertahanan Indonesia diimplementasikan secara dinamis sesuai hakikat ancaman baik militer maupun nonmiliter. Ancaman nonmiliter adalah ancaman yang tidak berbentuk fisik tetapi berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, dan keselamatan umum. Strategi pertahanan negara dirumuskan dalam rangka menghadapi ancaman militer maupun non militer yang didasarkan atas tiga substansi pokok yaitu apa yang dipertahankan (*ends*), dengan apa mempertahankan (*means*), serta bagaimana mempertahankan (*ways*) (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Merespon kondisi lingkungan strategis yang dinamis, Pemerintah Indonesia berperan penting dalam menentukan kebijakan pertahanan untuk mengoptimalkan kemampuan guna menanggulangi berbagai ancaman.

Perkembangan ancaman non militer salah satunya ditimbulkan oleh penyusupan aktor anarko sindikalisme pada peringatan hari buruh internasional 2019 di Kota Bandung. Anarko sindikalisme merupakan paham yang menginginkan pembubaran seluruh lembaga kekuasaan politik yang dinarasikan menindas dan mengeksploitasi kalangan buruh digantikan komunitas bebas yang terikat oleh kepentingan sosial-ekonomi (Wahyono, 2020). Penganut anarko sindikalisme memandang bahwa pergerakan revolusioner hanya dapat dicapai oleh pekerja yang lepas dari subordinasi pemerintah dan partai politik (Rocker, 2017). Akan tetapi, anarko sindikalisme di Indonesia tidak hendak membuat negara sendiri tetapi memandang negara pada fungsi administratif termasuk mematuhi undang-undang dan peraturan. Akan tetapi mengkritik kebijakan yang bertentangan dengan kebutuhan masyarakat (Nainggolan, 2019). Akan tetapi, ketidaktaatan terhadap hukum dan kericuhan yang dilakukan aktor anarko sindikalisme akan mengakibatkan ancaman keamanan dan keselamatan umum yang apabila tidak diantisipasi akan menjadi ancaman baru bersifat asimetris.

Aktor anarko sindikalisme memanfaatkan cara asimetris untuk menciptakan sikap anti-pemerintah pada peringatan hari buruh 2019. Pada implementasinya, aktor anarko sindikalisme menerapkan konsep peperangan asimetris yaitu menghasut yang lebih lemah/



orang yang terpinggirkan (*unprivileged section*) melalui isu keburukan politik suatu negara, perbedaan kelas, kepercayaan, atau komunikasi untuk membangkitkan anti-pemerintah (Katoch, 2010). Pendekatan asimetris aktor anarko sindikalisme yang digunakan meliputi konflik sosial masyarakat, isu buruh, dan perkembangan teknologi. Konflik sosial yang dimanfaatkan yaitu korban penggusuran wilayah Tamansari, pengangguran lulusan perguruan tinggi. Selain itu, buruh juga dirampas haknya untuk hidup sejahtera dan merdeka, kerentanan pelecehan buruh perempuan, tidak terpenuhinya hak-hak maternitas buruh perempuan dan diskriminasi upah, diskriminasi terhadap buruh yang memiliki ekspresi gender beragam atau orientasi seksual tertentu, keran investasi asing yang merugikan kelas buruh berupa penggusuran, konflik agraria, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, liberalisasi dan komersialisasi pendidikan, dan upah murah (Redaksi KSN, 2019). Kemudian, perkembangan teknologi dilakukan melalui penyebaran informasi yang menarasikan kesenjangan sosial dan ekonomi yang kemudian digiring untuk melakukan cara-cara anarkis (Bappenas, 2011). Namun demikian, pemerintah kesulitan melakukan deteksi dini karena aktor anarko sindikalisme beroperasi secara sel dan berpindah-pindah.

Anarko sindikalis bergerak secara kolektif. Organisasi anarko berbentuk *adhocracy* sehingga tidak memberi ruang untuk adanya pemimpin struktural tetapi dalam kelompok atau kolektif (Ali, 2013). Secara struktur organisasi, aktor anarko sindikalisme tidak memiliki ketua ataupun sekretaris jenderal tetapi memiliki kepengurusan fungsional yaitu bendahara dan sekretaris yang bersifat sukarela dan bergantian selama satu atau dua tahun sekali. Anggota anarko sindikalisme kemudian membentuk kolektif yang beranggotakan 5-7 orang. Komunikasi antar anggota umumnya memanfaatkan media sosial terutama *whatsapp* dan email yang intensitasnya tidak rutin (Nainggolan, 2019).

Media pergerakan aktor anarko sindikalis bergeser dari jalanan kepada internet. Pergerakan pemuda didorong oleh keinginan mengubah masyarakat yang didorong oleh keinginan melawan karena ketakutan masyarakat akan hancur karena perbuatan menyimpang atau sikap apatis karena kecewa terhadap masyarakat (Soekanto, 2005). Namun demikian, berkurangnya ruang-ruang publik sebagai sarana perkumpulan pemuda



akibat pembangunan fasilitas publik dimanfaatkan aktor anarko sindikalisme untuk menjaring kalangan pemuda.

Kota Bandung merupakan lokasi strategis dan efektif dalam menggabungkan tuntutan buruh pada momentum hari buruh internasional. Berdasarkan kuantitas, buruh di Kota Bandung relatif sedikit dimana mayoritas berada di Kabupaten Bandung. Akan tetapi, Kota Bandung bersifat strategis karena ibukota Jawa Barat dan lokasinya berdekatan dengan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Selain itu, Bandung merupakan tempat pertama berdirinya Front Anti Fasis (FAF) pada tahun 1995 yang beranggotakan kelompok punk yang merupakan penggerak gerakan sosial dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh. Faktor lainnya yaitu kemudahan dalam mobilisasi massa pasca 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional, isu menarik bagi media, dan disorot secara internasional (Rahmawati, 2019). Oleh karena itu, pemanfaatan buruh yang jumlahnya besar akan berpotensi menjadi ancaman potensial bagi pertahanan negara.

Pergerakan buruh turut bergeser dari gerakan sosial kepada gerakan politik. Berdasarkan konsep *New Labour*, buruh tidak hanya berfokus pada masalah upah atau hubungan industrial, tapi juga melangkah ke isu-isu yang bersifat politik praktis maupun politik makro (Zuhdan, 2014). Hal ini ditandai dengan keberpihakan buruh terhadap salah satu calon pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Bandung 2018, dan pada tahun 2019 mendorong adanya perwakilan buruh di parlemen baik ditingkat nasional maupun daerah. Selain itu, Serikat Buruh juga diasumsikan mulai bergabung dengan pemerintah pasca pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Serikat Buruh yang mengakibatkan tuntutan buruh relatif melunak pada tahun 2019. Akan tetapi, kondisi ini meresahkan bagi aktor anarko sindikalisme karena gerakan melalui parlemen merupakan perjuangan terlemah dan tanpa harapan karena tidak memberikan perlindungan terhadap buruh dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari (Rocker, 2017).

Pada peringatan hari buruh 2017-2019, tuntutan massa aksi cenderung diimplementasikan melalui cara-cara anarkis. Kondisi ini berbeda dengan pada masa awal penetapan 1 Mei sebagai hari libur nasional tahun 2014 dimana tuntutan buruh dilakukan melalui cara damai dan kondusif. Pada tahun 2017 terjadi aksi vandalisme, pembakaran,

perusakan fasilitas umum, dan kericuhan yang diinisiasi oleh pemuda Kolektiva yang menggunakan atribut hitam-hitam (Tempo.co, 2017). Aksi ini kembali terulang pada tahun 2018 yang diinisiasi oleh kelompok Gerakan Rakyat Anti Kapitalisme (GERAK) melalui penyebaran poster di media sosial *instagram* dan *facebook* (Pratiwi, 2018). Kemudian tahun 2019, aksi serupa terjadi dinyatakan dilakukan oleh aktor anarko sindikalisme. Namun demikian, aksi kekerasan justru terjadi pasca Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan pada tahun 2016 bahwa kalangan buruh tidak pernah melakukan aksi anarkis pasca 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional (Fardiansyah, 2016).

Aktor anarko sindikalisme mencederai aksi damai hari buruh 2019 di Kota Bandung. Massa aksi melakukan aksi vandalisme di beberapa lokasi diantaranya Sekolah Luar Biasa (SLB)-C Plus di Jalan Singaperbangsa, Taman Dago, dan juga mencoret-coret 25 kendaraan milik Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat. Simbol "A" merujuk pada *no rule* terhadap aturan yang dibuat oleh kaum borjuis, bangsawan, dan



Gambar 1 Vandalisme di Kota Bandung pada Hari Buruh 2019

Sumber: CITATION Muk19 \t \l 1033 (Dinillah, 2019)

negarawan (Nainggolan, 2019). Berdasarkan konsep anarko sindikalisme, perusakan fisik bukanlah dilihat dari tingkat keparahannya, tetapi kemampuan mempengaruhi siklus kapital dan psikologi pasar (Putra, 2018). Namun demikian, aksi kekerasan dianggap efektif berkaca dari kerusuhan total di Kota Bandung selama tiga hari berturut-turut pada tahun 2001 yang berhasil memaksa pemerintah Jawa Barat untuk memberlakukan kembali Kepmenaker No. 150/Men/2000 (Tim Peneliti SMERU, 2002).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan Program *Demo Creation Labour* yang bertemakan *Mayday is Creative Day, Together We Grow*. Tujuannya yaitu mengubah



paradigma hari buruh rusuh dengan konsep yang kreatif melalui kegiatan lomba dan tetap dapat berbincang tentang solusi permasalahan buruh (Humas Bappeda Jabar, 2019). Berdasarkan perspektif peperangan, aktor anarko sindikalisme selaku pihak yang lebih lemah cenderung unggul dalam mobilitas dan fleksibilitas dalam menghadapi pemerintah yang cenderung mempertahankan kondisi tetap dan sifat organisasi yang konservatif (Thornton, 2011). Akan tetapi, program *Demo Creation Labour* tidak efektif karena serikat buruh tetap melakukan aksi unjuk rasa di gedung sate yang akhirnya disusupi oleh aktor anarko sindikalis.

Koordinasi Kepala Daerah diwadahi melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Provinsi Jawa Barat. LKS Jawa Barat berdiri sejak 17 Juli 2018 yang menjadi wadah silaturahmi antara pemerintah, industri, dan buruh. Pemerintah Jawa Barat menegaskan keberpihakan terhadap kesejahteraan buruh melalui pembuatan perumahan buruh dan sekolah di dekat pabrik serta pemberian kursus kepada putra daerah (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2019). Namun demikian, kelompok anarko memandang serikat pekerja/buruh tidak diperlukan karena merugikan bagi buruh, negosiasi seringkali tidak melibatkan buruh, dan tidak memuaskan buruh (Nainggolan, 2019).

Pemerintah Jawa Barat melakukan koordinasi melalui Forkopimda menjelang peringatan hari buruh 2019. Pendekatan cenderung dilakukan melalui pengamanan karena Gedung Sate merupakan lokasi puncak peringatan hari buruh. Strategi yang dilakukan Kepolisian dilakukan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan melalui deteksi intelijen, preventif, pre-emptive, penegakkan hukum, dan pemulihan. Akan tetapi, strategi kepolisian belum efektif sehingga terjadi kerusuhan di gedung sate yang dilakukan oleh anarko sindikalis.

Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Bandung melakukan upaya deteksi dini. Deteksi dini dunia maya penting di era modern karena pengorganisasian anarko sindikalisme cenderung melalui online/media sosial. Kondisi ini \ berdasarkan pada hasil interogasi kepolisian di Polrestabes Bandung bahwa massa aksi bergerak karena ajakan dari



media sosial *whatsapp*, *facebook*, dan *Instagram*, maupun ajakan teman sebagai bentuk solidaritas terhadap buruh. Namun demikian, pengamanan cenderung sulit dikarenakan latar belakang massa aksi yang anti-hierarkis sehingga tidak tergantung pada faktor tertentu, dan fleksibel.

Preemptive dilakukan melalui penangkalan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memelihara stabilitas keamanan dalam negeri. Komunikasi pada era reformasi menempatkan media massa sebagai *public sphere* yang mendorong partisipasi masyarakat. Aktor anarko sindikalis melakukan agitasi politik dan propaganda aktor anarko sindikalisme yang berperan dalam membangkitkan emosi dan mengontrol sikap individu masyarakat (Pureklolon, 2016). Kondisi ini mengakibatkan penggalangan yang dilakukan belum efektif sehingga banyak kalangan simpatisan yang berasal di luar kota Bandung turut datang ke Bandung untuk meramaikan aksi buruh di Gedung Sate dengan menggunakan atribut serba hitam.

Preventif merupakan upaya kepolisian untuk mencegah dan mengeliminir berkembangnya suatu potensi gangguan menjadi ambang gangguan (AG). Polrestabes Bandung mengerahkan personil 1.300 personil untuk mengamankan aksi damai buruh melalui jalan kaki bersama dari titik kumpul di Monumen Perjuangan ke Gedung Sate (Adhey, 2019). Namun demikian, aksi damai buruh tetap dicerai oleh aksi vandalisme bahkan aksi kejar-kejaran antara Tim Prabu Polrestabes Bandung dan pemuda beratribut hitam-hitam (Tim Detik.com, 2019).

Penegakkan hukum dilakukan melalui penjaringan massa aksi pada peringatan hari buruh 2019. Polrestabes Bandung melakukan penangkapan terhadap 619 peserta aksi yang 293 diantaranya merupakan anak-anak dan 14 orang perempuan (Bernie, 2019). Namun demikian, berdasarkan data Polrestabes Bandung, peserta aksi berjumlah 561 orang dan 223 orang diantaranya adalah pelajar. Namun yang dikritisi oleh pelaporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) adalah adanya aksi kekerasan dan intimidasi verbal dari kepolisian (Fisandra, 2019). Aksi represif kepolisian tersebut dipandang sebagai kesewenang-



wenangan dan ketidakdewasaan dalam demokrasi. Selain itu, Dosen Sosiologi Fisipol UGM, AB Widyanta justru mendorong pemerintah untuk memberikan ruang bagi gerakan anarko sindikalisme (Lazuardi, 2019).

Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum efektif dalam menghadapi ancaman anarko sindikalis. Anarko sindikalis menggunakan taktik asimetris untuk memperoleh dukungan masyarakat melalui isu tentang konflik sosial maupun isu buruh yang disebarakan melalui media sosial sehingga sulit untuk diantisipasi oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang diatas, Peneliti akan melaksanakan penelitian berjudul **Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menghadapi Ancaman Anarko Sindikalisme dalam Perspektif Peperangan Asimetris pada Peringatan Hari Buruh 2019 di Kota Bandung.**

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Peneliti studi kasus mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer atau beragam sistem terbatas, dan mendeskripsikan data apa yang harus dikumpulkan, dan mendeskripsikan kasus dan tema kasus. Namun demikian, kasus dapat berkembang untuk mengeksplorasi dan membandingkan hubungan antar gagasan dalam kasus tertentu (Creswell, 2019).

Tempat atau instansi yang dituju oleh peneliti yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mengambil data di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bandung, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Jawa Barat dan Kota Bandung, serta gerakan sosial yang ada di Kota Bandung.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terbuka dan tersamar, wawancara semi terstruktur, dan analisis dokumen. Peneliti tetap melakukan observasi penelitian walaupun kasus terjadi pada tahun 2019. Observasi terhadap gerakan sosial didasarkan pada hasil wawancara narasumber terkait penyebaran paham anarko sindikalis di Bandung.



Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferability (ketepatan dan dapat atau tidaknya diterapkan pada lokasi pengambilan sampel, dependability (audit terhadap proses penelitian), dan confirmability (pengujian hasil penelitian) (Sugiyono, 2019).

Menurut Miles and Huberman (Sugiyono, 2019), aktivitas analisis data dilakukan melalui *data collection* (Pengumpulan data), *data condensation* (kondensasi data), *data display* (penyajian data), dan *closing drawing / verification* yang dilakukan secara secara interaktif .

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ancaman Anarko Sindikalis pada Peringatan Hari Buruh 2019 di Kota Bandung

Pelabelan Anarko Sindikalis

Pemerintah menyatakan aktor dari aksi anarkisme di kota-kota besar pada hari buruh 2019 adalah anarko sindikalis. Kepala Kepolisian RI, Tito Karnavian mengatakan bahwa gerakan anarkisme yang melakukan vandalisme pada hari buruh internasional di Kota Besar adalah anarko sindikalisme. (Puspita, 2019) Personil Polrestabes Bandung, Anto menyatakan bahwa pencetusan aktor yang melakukan kerusuhan pada hari buruh 2019 adalah anarko sindikalis didasarkan pada masukan peneliti, mahasiswa, mantan anarkis, ahli perburuhan yang dilibatkan oleh pihak kepolisian.

Aksi anarkis pada peringatan hari buruh di Gedung Sate telah terjadi sejak tahun 2017. Massa aksi melakukan aksi vandalisme dan kerusuhan. Akan tetapi, peringatan hari buruh 2019 masif disoroti karena adanya pergesekan antara buruh dan aktor anarko sindikalisme secara langsung berupa vandalisme kendaraan di Monumen Perjuangan Bandung. Dosen Peperangan Asimetris, Muradi menyatakan bahwa terdapat empat alasan penyebutan anarko sindikalis yaitu: a. pendekatan 2019 lebih masif dibandingkan tahun 2017 karena mengambil alih berbagai unjuk rasa di Bandung, b. memang sudah menargetkan tahun 2019 dan memandang penangkapan anggota merupakan konsekuensi dari ideologi yang diyakini, c. menargetkan dan telah berkonsolidasi dengan kota-kota besar, serta d. meleburnya anarko anti-gerakan buruh dan anarko gerakan buruh.



Anarko sindikalis merupakan kuadran kiri ekstrem. Berdasarkan kompas ideologi dibawah, anarko sindikalis berada jauh dari prinsip authoritarian dan mendekati pada libertarian. Mereka mengasumsikan individu sebagai subjek otonom. Hal ini sejalan dengan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fikri yang menyatakan bahwa kondisi ini berbeda dengan stalinisme/ marxisme-leninisme yang kiri ekstrim tetapi mendekati pada authoritarian (partai dan apparatus nya sebagai garda depan)

Kalangan pelajar menjadi massa aksi dominan yang terjaring pada peringatan hari buruh 2019. Ancaman potensial asimetris melalui operasi informasi memiliki dampak yang mirip dengan senjata nuklir (Katoch, 2010). Wakil Kepala Sekolah SMK Nasional Bandung, Hardianto menyatakan bahwa sikap media yang menyudutkan siswa sebagai bullying sosial. Padahal, pendidikan di Indonesia bertujuan membentuk *good citizenship*. Tindakan siswa seharusnya dipandang dari sisi tingginya kepedulian, kesadaran politik siswa, dan terpanggil karena orangtuanya buruh. Namun demikian, Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto menyatakan bahwa keterlibatan siswa cenderung didesain karena anak dibawah umur hanya boleh ditahan 1x24 jam dan tidak membawa identitas baik KTP/ kartu pelajar saat aksi.

Pemerintah mengkonotasikan radikal terhadap paham anti-Pancasila. Berdasarkan konsep pertahanan negara, sarana perjuangan bangsa bertumpu pada kekuatan rakyat yang dipersenjatai secara psikis (ideologi Pancasila) dan fisik (kemampuan bela negara yang tinggi) (Kementerian Pertahanan RI, 2014). Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Sub Bidang Ideologi, Erry Gandana mendorong penanaman nilai Pancasila penting untuk disesuaikan dengan arus globalisasi sehingga nilai kebudayaan dan kearifan lokal tidak luntur serta memiliki kebanggaan terhadap Indonesia. Oleh karena itu, program bela negara baik bagi buruh, pelajar, mahasiswa, maupun elemen masyarakat lainnya dapat menjadi salah satu senjata psikis pemerintah dalam lingkup pertahanan negara sehingga masyarakat yang tidak mudah terprovokasi dan turut membantu pemerintah dalam melawan paham anarko sindikalis.



Anarko Sindikalisme Diminati Kalangan Intelektual dan Masyarakat di Kota-Kota Besar

Anarko sindikalisme merupakan gerakan alternatif terhadap kalangan intelektual dan kapitalisme. Pertama, kampus tidak memiliki kebebasan akademik karena membredel dan memberangus diskusi. Kedua, protes terhadap kampus yang dinarasikan sebagai agen kapitalisme yang mengabsahkan pembangunan yang eksplotatif melalui artikulasi dan advokasi masyarakat. Ketiga, kekecewaan terhadap alumni kampus yang dahulunya idealis terutama pemikiran kiri yang berkhianat (Polrestabes Bandung, 2019).

Anarko sindikalisme menggunakan pendekatan asimetris untuk menjangkau kalangan pemuda dan masyarakat perkotaan. Dalam konsep peperangan asimetris, pihak yang lemah cenderung unggul pada aspek mobilitas dan fleksibilitas karena pihak yang kuat cenderung mempertahankan kondisi tetap, konservatif dan menginginkan pertarungan tertentu (Thornton, 2011). Kondisi ini tampak dari taktik pendekatan yang cair, horizontal, tidak terpaku pada tokoh tertentu, dan pembangunan nilai ideologi dengan santai mengikuti tren (gaya terbaru) anak muda termasuk media mural, music, dan zine. Kemudian digiring pada aksi militan melalui partisipasi dan penghargaan pendapat. Oleh karena itu, anarko merupakan ancaman politik ideologi yang membutuhkan penanganan ekstra (Polrestabes Bandung, 2019).

Anarko sindikalisme cerdik dalam memanfaatkan media sosial untuk menggiring dukungan populasi. Wehr dan Bartos mengatakan bahwa solidaritas kelompok didorong oleh beroperasinya ideologi dalam kelompok, memberi doktrin, dan semangat perlawanan. Solidaritas ini kemudian membentuk organisasi dan mobilisasi massa untuk memenangkan konflik (Susan, 2014). Salah satu aktor yang terjaring pada peringatan hari buruh 2019, Febri menyatakan bahwa aktor anarko sindikalisme membawa bendera lambang "A" dalam lingkaran pada peringatan hari buruh 2019 tetapi sulit dibedakan karena massa aksi berkumpul. Hal ini sejalan dengan pernyataan anggota Polrestabes Bandung, Anto bahwa "pada saat aksi, hanya mengenal kelompoknya saja tetapi tidak mengenal kelompok lainnya (termasuk tidak mengetahui tujuan kehadiran dan atribut yang digunakan). Akan tetapi,

pada saat berhadapan dengan polisi kelompok anarko yang tidak mengenal tersebut bersatu”.

Anarko sindikalis berkembang di kalangan pelajar dan masyarakat perkotaan. Durkheim membagi masyarakat dalam masyarakat mekanik dan masyarakat organik. Masyarakat organik adalah masyarakat yang bergerak atas dasar kebutuhan sebagai masyarakat modern (Susan, 2014). Kondisi ini mengakibatkan anarko sindikalis cenderung berkembang di Kota Besar. Kaum anarkis umumnya terdidik, dengan akses informasi luas, dan sepenuhnya sadar akan jalan yang mereka pilih. Penganut anarkisme memahami ide-ide anarkis melalui membaca atau kesenian kemudian langsung berjejaring (Cahyana, 2019). Menurut Dosen Peperangan Asimetris, Muradi paham anarko sindikalis cenderung berkembang di Kota dilatarbelakangi oleh tiga hal yaitu hidup di kelas menengah atas (suka membaca), dalam posisi transformasional (kondisi hitam atau putih), dan memiliki waktu untuk membandingkan dan memperkirakan masa depan dan sekarang.

Agitasi Politik dan Pengenalan Paham Anarko Sindikalis

Pergerakan anarko sindikalis ditimbulkan oleh keinginan serikat pekerja/serikat buruh untuk masuk dalam pemerintahan atau parlemen. Gerakan buruh sudah bergeser pada *new labour* yang tidak berkuat pada masalah upah atau hubungan industrial tetapi gerakan politik praktis maupun makro (Zuhdan, 2014). Berdasarkan konsep anarko sindikalis, pergerakan revolusioner hanya dapat dicapai oleh pekerja yang bebas dari subordinasi pemerintah dan partai politik (Rocker, 2017). Oleh karena itu, muncul pertentangan anarko sindikalis dengan vandalisme “lawan serikat elite”, pencoretan mobil serikat buruh pada hari buruh 2019 di Kota Bandung.

Anarko sindikalisme merupakan ancaman nonmiliter. Pada hakikatnya, ancaman merupakan setiap usaha dari dalam negeri dan luar negeri untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Doktrin Pertahanan Negara, ancaman non militer adalah ancaman yang menggunakan faktor non militer berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, dan keselamatan umum.

Peneliti berpandangan bahwa, anarko sindikalis merupakan ancaman non militer yang berdimensi ideologi, sosial, dan teknologi.

1) Dimensi Ideologi. Anarko sindikalisme merupakan salah satu ancaman berdimensi ideologi. Ancaman ideologis dapat berupa kekerasan dan anarkis yang dilakukan kelompok-kelompok berpaham radikal dengan alasan keagamaan atau golongan politik fundamental anti keamanan (Kementerian Pertahanan RI, 2014). Hal ini sejalan dengan pernyataan Muradi bahwa anarko sindikalis merupakan organisasi yang terikat pada kedekatan ideologi, keyakinan politik, dan menganggap negara tidak ada.

Menurut Mahasiswa Sejarah kajian Buruh, Appridzani Syahrullah, anarko sindikalis di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Bakunin sehingga tidak mengenal organisasi tetapi kolektif. Anarko memiliki pola dan strategi insureksi (aksi langsung) meliputi tahapan persiapan aks, pembagian tim, dan aksi. Fikri menambahkan bahwa aksi vandalisme dan kekerasan tetap dipertahankan oleh aktor anarko sindikalis sebagai bentuk *repertoire* bahwa gerakan masih ada dan menimbulkan keterkejutan kepada otoritas negara dan aparat keamanan. Tujuan aksi kekerasan adalah mempengaruhi siklus capital dan psikologi pasar bukan dari tingkat kekerasan dan kriminalitasnya (Putra, 2018).

2) Dimensi Sosial. Ancaman dimensi sosial ini ditandai dengan permasalahan keadilan dan pemerataan (Kementerian Pertahanan RI, 2014). Kondisi ini penting diperhatikan sejalan dengan pernyataan Fikri bahwa kehadiran anarko dilatarbelakangi kejelian membaca ketidakhadiran negara dan isu kesejahteraan masyarakat sipil. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan misi kelima Pemerintahan Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yaitu “meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil”. Namun demikian, apabila negara mampu memenuhi kesejahteraan dan kepastian tidak menghilangkan anarko sindikalis tetapi hanya membuatnya tidak populer.

Kondisi ini dapat dikaitkan dengan gerakan sosial di Bandung. Gerakan Sosial Pasar Gratis yang ingin mewujudkan masyarakat tanpa kelas dan menolak konsumerisme. Kemudian, aksi kamisan yang mengkritik tidak diselesaikannya pelanggaran HAM, dan Forum Juang Tamansari Melawan yang hendak melawan kesewenang-wenangan pemerintah. Bila berkaca dari anarkisme di internasional, terdapat beberapa lokasi yang menerapkan anarkisme walaupun tidak sempurna seperti masyarakat Christiania Denmark yang mengatur komunitas sendiri secara musyawarah dan polisi tidak memiliki peran, anarkis Rojava yang ikut berperang melawan ISIS, dan keberhasilan Mondragon Corporation Spanyol yang pengambilan keputusan dan struktur gaji paling demokratis (Cahyana, 2019).

3) Dimensi Teknologi. Penggunaan media sosial memudahkan aktor anarko sindikalis memobilisasi massa. Ancaman dimensi teknologi juga berkaitan dengan penggunaan jejaring media sosial yang menyebarkan informasi tendensius pembentuk opini salah yang mendorong gerakan sosial bermotif politik (Kementerian Pertahanan RI, 2014). Anarko menggunakan media sosial merupakan salah satu metode peperangan asimetris. Media sosial digunakan aktor peperangan asimetris untuk menggunakan operasi psikologis untuk mendapatkan dukungan populasi terutama pihak yang lemah dan terpinggirkan untuk memperkuat pemikiran keburukan politik negara dan membangkitkan sikap anti-pemerintah (Katoch, 2010). Kondisi ini sejalan dengan pernyataan aparat sipil negara dari Kesbangpol Jawa Barat, Aan bahwa media sosial terutama whatsapp dan facebook paling cepat untuk menanamkan sikap anti pemerintah. Kondisi ini sejalan dengan penggunaan media sosial oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk melakukan *blow up* (meledakkan) informasi tentang benturan antara kepolisian dan buruh serta ajakan merusak di media sosial. Selain itu menunjukkan bahwa keburukan pemerintah dan tujuan positif gerakan. Informasi ini dijadikan alat mendatangkan massa aksi walaupun banyak massa aksi yang setelah ditangkap tidak memahami alasan datang pada hari buruh 2019

Pendidikan moral dapat melalui pendidikan politik di tingkat sekolah. Fungsional Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Jawa Barat, Dedi



menyarankan perlunya pendidikan politik dalam kurikulum pendidikan agar siswa tidak mudah diprovokasi oleh kelompok/pribadi yang berkepentingan politik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Appridzani bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi turut mendorong adanya persamaan pengetahuan antara siswa dan mahasiswa. Oleh karena itu, Fikri mendorong adanya pelibatan intelektual progresif untuk melakukan kontra wacana secara pertimbangan psikologis lebih efektif untuk melakukan pendekatan dengan kalangan pelajar agar tidak terkesan digurui.

Kegiatan Anarko Sindikalis di Kota Bandung

Pengorganisasian anarko sindikalis bersifat desentralisasi dan non-hirarkis. Desentralisasi menekankan pada pengambilan keputusan didasarkan keputusan seluruh anggota kolektif. Sedangkan non-hierarkis menekankan pada aktivitas dilakukan atas dasar inisiatif, partisipasi individu, dan menghapuskan batas divisi kerja. Adapun aktor yang bertindak aktif dinarasikan sebagai kepemimpinan ide. Anggota kolektif biasanya merupakan orang yang memiliki pandangan yang sama dan orang-orang yang hidup relatif berdekatan (Ruang Bebas Uang, 2021).

Anarko sindikalis tidak memiliki struktur birokrasi. Menurut Muradi, anarko sindikalis tidak memiliki pemimpin tetapi memiliki *informal leader/* yang dituakan tetapi tidak sebagai leader Berdasarkan konsep kolektif, aktor yang bertindak lebih aktif tidaklah dikatakan kepemimpinan ide yang mendorong proses belajar dalam kolektif, katalis, dan penyalur/pembagi informasi terhadap kolektif. Dengan demikian, kolektif akan membentuk kepemimpinan bersama yang revolusioner yang memiliki rasa saling memiliki dan bertanggung jawab (Ruang Bebas Uang, 2021). Namun demikian, Fikri mengkritisi klaim kontradiksi klaim tidak memiliki hierarki padahal menerapkan pembagian tugas dalam aksi anarko sindikalis.

Anarko sindikalis tidak hanya dianut oleh kalangan buruh. Prinsip yang digunakan dalam pergerakan buruh adalah solidaritas pekerja (*workers solidarity*), aksi langsung (*direct action*), dan manajemen mandiri buruh (*workers self-management*). Pada perkembangannya,

anarko sindikalis juga berkembang di kalangan seniman, aktivis kampus, dan kaum miskin kota. Namun demikian, kelompok anarko sindikalis seringkali dimanfaatkan oleh kelompok anarkis lainnya dalam pergerakan massa melawan negara, pemerintah, atau lainnya (Ali, 2013). Hal ini sejalan dengan pernyataan Anto bahwa anarko sindikalis dimanfaatkan dan memanfaatkan melalui provokasi media sosial terkait itu buruh dan rumah deret Tamansari.

Gerakan dan taktik anarko yang digunakan yaitu *do it yourself*, *feed not bombs*, dan *direct action* (aksi langsung), *gig* (pertunjukan music), *zine*, literasi mural, dan *hacker*. *Do it yourself* yaitu menawarkan alternative budaya yang menentang konsumerisme. *Food not bombs* yaitu gerakan otonomi tanpa kekerasan untuk berbagi makanan vegetarian di tempat publik terutama pada masyarakat miskin. Dan *direct action* melalui vandalisme, sabotase, ataupun deskriptif suatu sistem operasi yang hierarkis, koersif, dan dominatif (Polrestabes Bandung, 2019).

Nilai-nilai anarko sindikalis tercermin melalui gerakan sosial di Bandung. Kebangkitan anarko sindikalisme didorong oleh faktor keterasingan pemuda terhadap kehidupan kota yang konsumeristik, struktur negara yang menindas, TAP MPR 1965 yang melarang pendirian partai komunis, dan kegagalan gerakan gerakan negara komunis otoritarian dan semakin menguatnya anarkisme (Putra, 2018). Hal ini terwujud dari gerakan sosial seperti pasar gratis yang melawan konsumerisme dan kapitalisme dan ingin mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Kemudian aksi kamisan yang mengkritik pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan oleh pemerintahan dan menuntut ruang-ruang demokrasi yang selalu dibungkam. Sedangkan Tamansari Melawan yang menunjukkan kepedulian terhadap sikap kesewenang-wenangan yang dibuat pemerintah kota Bandung dan membantu rakyat yang tertindas.

Gerakan sosial tidak dapat disamaratakan berpaham anarko sindikalis. Menurut Fikri, media cenderung *gebyah uyah* (menyamarkan) padahal anarko di Indonesia cenderung merujuk pada isu buruh tetapi isu penindasan masyarakat kecil. Selain itu, Dosen UGM, A.B. Widyatama menyatakan bahwa anarkisme bukanlah gerakan tunggal karena ada yang menggunakan kekerasan dan ada yang anti terhadap kekerasan sedangkan vandalisme



bertujuan memperoleh perhatian publik. Namun demikian, anarko sindikalis tidak pernah menganjurkan vandalisme (Cahyana, 2019).

Pendanaan anarko sindikalis seadanya. Anto menyatakan bahwa pendanaan dilakukan secara urunan anggota: “tidak ada dana, pendanaan bersifat udunan/urunan kelompok saja sehingga seadanya”. Kondisi ini sejalan dengan temuan peneliti di lapangan bahwa pendanaan kolektif dilakukan secara urunan dan penjualan stiker ataupun atribut dengan slogan “rakyat bantu rakyat”.

Anarko sindikalis tidak akan padam walaupun kesejahteraan dipenuhi oleh pemerintah. Hakikat negara kesejahteraan adalah kesadaran warga negara terhadap hak-hak yang dimilikinya sedangkan negara diberi mandat memenuhi kebutuhan hak-hak warga negara (Suharto, 2008). Mansour Fakih menyatakan bahwa anarkisme tidak akan padam karena kecenderungan alami manusia untuk memberontak atas tekanan hidup (Putra, 2018). Namun demikian, Fikri mengatakan bahwa aliran pemikiran hilang tetapi tidak populer dan berpotensi digunakan kembali sebagai alternatif gerakan menghadapi kapitalis dan konsumerisme.

Strategi Pemerintah Jawa Barat dalam Menghadapi Ancaman Paham Anarko Sindikalis dalam Perspektif Peperangan Asimetris pada Hari Buruh 2019

Pengamanan dilakukan melalui Perkap Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kegiatan tersebut meliputi deteksi intelijen, pre-emptive, preventif, penegakkan hukum, dan pemulihan. Namun demikian, kegiatan pengamanan dilakukan oleh berbagai elemen pemerintahan bukan hanya Polrestabes Bandung.

Strategi Deteksi Intelijen

Deteksi intelijen dilakukan melalui berbagai komponen intelijen baik intelijen pengawas daerah (Wasda) pemerintah provinsi jawa barat, TNI, Polrestabes, dan Badan Intelijen Daerah (Binda). Deteksi intelijen merupakan deteksi kerawanan di tengah kehidupan masyarakat yang dapat mengancam stabilitas nasional. Aan menyatakan bahwa deteksi



intelijen ini dilakukan oleh seluruh intelijen di Jawa Barat. Adapun hasil deteksi dini adalah sama karena sifatnya koordinasi.

Anarkisme dinyatakan sebagai salah satu tantangan Indonesia tahun 2021. Guru Besar Intelijen dan Hukum, Jendral Hendropriyono menyatakan terdapat 4 tantangan bagi Indonesia tahun 2021 yaitu anarkisme, organize crime (kriminalitas terorganisir), separatism, dan subversi. Anarkisme akan dimanfaatkan oleh orang-orang sakit hati, orang yang tidak mendapat tempat, dan tidak kebagian kue dalam pemerintahan Jokowi (Hendropriyono, 2021). Pernyataan ini juga diperkuat oleh Fikri bahwa potensi dan arah gerakan seringkali bernegosiasi di kalangan elite walaupun secara prinsipnya anti otoritas terutama lembaga negara dan agama.

Keberhasilan strategi peperangan asimetris ditandai oleh dukungan populasi yang biasanya digunakan melalui media. Aktor anarko sindikalis berkembang tidak hanya dikalangan buruh tetapi juga seniman, aktivis kampus, dan kaum miskin kota melalui tabing (kursus politik informal) di berbagai tempat terutama emperan pertokoan dan kolong jembatan (fly over) (Ali, 2013). Kondisi ini sejalan dengan deteksi kepolisian bahwa anarko seringkali berkumpul di Taman Pasopati yang letaknya berada di bawah fly over Pasopati Bandung

Kepolisian sulit mengantisipasi gerakan anarko sindikalis yang selalu berubah-ubah. Dalam aksinya, dalam praktik asimetris pihak yang lemah cenderung unggul pada aspek mobilitas dan fleksibilitas karena pihak yang kuat cenderung mempertahankan kondisi tetap, konservatif dan menginginkan pertarungan tertentu (Thornton, 2011). Hal ini dipraktikkan anarko yang setiap aksinya menggunakan metode yang berubah-ubah, taktik *black bloc*, dan provokatif untuk menguatkan solidaritas dalam menghadapi represifitas polisi.

Strategi Preemptive

Strategi preemptive dilakukan oleh berbagai komponen diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, TNI, Polrestabes Bandung, dan pemerintah Kota Bandung. Strategi preemptive merupakan upaya pembinaan dan penataan masyarakat agar memiliki daya tangkal yang tinggi dan tidak mudah terpengaruh oleh ancaman serta mendorong



terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara stabilitas nasional. Strategi ini dilakukan secara bersama-sama oleh Kepolisian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bandung.

Anarko merupakan orang-orang yang paham terhadap teknologi dan memiliki kemampuan menguasai media sosial sehingga mampu mendiskusikan dan mendialetiskan situasi terkini dan fenomena dunia. Aktor asimetris (*asymmetric warrior*) cenderung terdidik, techno-savvy (paham banyak terhadap teknologi modern khususnya komputer), dapat mengeksploitasi *cyber space*, dan dapat bergabung dengan lingkungan perkotaan (*urban milieu*) (Katoch, 2010). Merespon hal tersebut, Polrestabes Bandung sudah memiliki satuan *cyber troops* yang akan membantu dalam mengatasi konten-konten anti pemerintah. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan pemerintah harus fleksibel, memahami cara berpikir dan beroperasi, asal inspirasi, dan kepentingan anarko sindikalis.

Strategi untuk mengalahkan aktor peperangan asimetris dilakukan dengan pengurangan kredibilitas melalui media. Globalisasi mempermudah aktor anarko sindikalis untuk melakukan operasi psikologis untuk memperoleh dukungan populasi. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi kredibilitas aktor anarko sindikalis melalui media (Katoch, 2010). Namun demikian, Aan menambahkan bahwa pemerintah kesulitan dalam melakukan kontra narasi terhadap whatsapp: "kemudian whatsapp itu sulit karena orang yang membikinya bahwa whatsapp tidak bisa di hack. Itu salah satu kendalanya karena harus melalui penggandaan nomor telepon tetapi sulit juga kalau misalnya untuk mendapatkan whatsapp grup apa".

Strategi Preventif

Strategi Preventif umumnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengeliminir berkembangnya potensi gangguan menjadi ambang gangguan. Hari buruh sebenarnya adalah hari ulang tahun buruh tetapi diselewengkan dengan unjuk rasa. Hal ini ditandai dengan pemasangan spanduk "selamat *mayday*", dan "mayday itu ulang tahun Serikat Pekerja Internasional". Mediator Hubungan Industrial, Dedi mengatakan bahwa buruh sebenarnya tidak boleh

unjuk rasa tetapi hanya boleh mogok kerja. Aksi anarkis seringkali disebabkan oleh tidak langsung dipanggilnya perwakilan massa aksi untuk audiensi dengan pemerintah.

Pemerintah Jawa Barat berupaya mengubah konsep peringatan hari buruh 2019 yang selalu dikatakan rusuh melalui program *Demo Creation Labour* (DCL). Strategi pemerintah harus dilakukan secara fleksibel dan adaptif dalam menghadapi lingkungan strategis dan menciptakan sinergitas antara *ends* (objektif), *ways* (konsep strategis), dan *means* (sumber daya) (Yarger, 2006). Namun demikian, program DCL yang dijadikan wadah penyampaian aspirasi buruh secara damai dan kreatif belum efektif karena masih adanya unjuk rasa di Gedung Sate yang kemudian diinfiltrasi oleh anarko sindikalisme.

Kota Bandung merupakan lokasi strategis karena ibukota Jawa Barat, lokasi sekretariat DPD Serikat Buruh Jawa Barat, dan lokasinya berdekatan dengan ibukota negara (Jakarta). Strategi tidak bersifat prediktif tetapi antisipatif dan proaktif. Strategi diperoleh melalui fakta, asumsi, dan kemungkinan. Ahli strategi dapat melakukan upaya paksaan (*coercive*) atau ajakan (*persuasive*) menggunakan *instrument of power* untuk mencapai tujuan nasional (Yarger, 2006). Tujuan pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah menjaga kondusifitas dan keamanan di Kota Bandung pada peringatan hari buruh 2019. Kepolisian berperan dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan yang meresahkan masyarakat.

Sumber daya (*means*) yaitu Polrestabes Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertugas untuk menjaga kondusifitas di Kota Bandung. Polrestabes Bandung membentuk Tim Prabu yang berada di bawah kendali bagian operasi untuk melakukan patroli di daerah yang dianggap rawan untuk mencegah tindakan pidana.

Konsep strategis (*strategic concept*) dilakukan berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2019. Polrestabes Bandung dapat meminta *back up* kepada Polda Jabar apabila dalam keadaan terdesak dan meminta bantuan TNI dalam situasi kamtibmas dalam skala besar. Kapolrestabes Bandung berperan sebagai ahli strategi yang akan mempertimbangkan, memprioritaskan, dan menetapkan *instrument power* yang utama (dominan) dan sekunder (*subordinate*) yang disesuaikan dengan lingkungan strategis dan tujuan strategis. Hal ini



dibahas dalam apel siaga bersama antara Polri dan TNI tentang *Technical Work Game* (TWG) agar memahami titik pengamanan

Penegakkan Hukum

Polrestabes Bandung memegang peranan utama dalam penegakan hukum pada demonstrasi hari buruh 2019 di Kota Bandung. Demonstrasi di kantor pemerintahan Jawa Barat, Gedung Sate merupakan wilayah operasi Polrestabes Bandung. Hal ini berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2019 bahwa operasi di tingkat Polres diselenggarakan dan dikendalikan oleh Polres dan Polda bertindak sebagai *back up*. Permintaan *back up* didasari oleh perkiraan intelijen bahwa konflik akan berkembang lebih luas dan tidak mampu dihadapi oleh kesatuan wilayah setempat.

Sikap represif kepolisian pada peringatan hari buruh 2019 cenderung tidak disetujui oleh pemerintah, serikat buruh, dan masyarakat. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi manusia, asas legalitas, prinsip praduga tak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan. Oleh karena itu, Appridzani Syahfrullah menyarankan pemerintah melakukan tindak hukum terhadap pelaku yang melakukan aksi vandalisme.

Konsolidasi gerakan dilakukan berdasarkan musyawarah secara desentralisasi dan kemudian disebarakan melalui media sosial. Aktor anarko sindikalis cenderung terdidik, *techno-savvy* (paham banyak terhadap teknologi modern khususnya komputer), dapat mengeksploitasi cyber space, dan dapat bergabung dengan lingkungan perkotaan (*urban milieu*) (Katoch, 2010). Aksi vandalisme dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai anarko sindikalisme. Pelajar menjadi aktor dominan terjaring pada peringatan hari buruh 2019 karena masih labil dan ingin senang-senang saja. Selain itu, Aan menyatakan belum bisa mendeteksi tokoh penggeraknya karena organisasi liar.

Indonesia menganut bentuk pemerintahan demokrasi. Penganut anarkisme memandang demokrasi sebagai pemerintahan rakyat atau rakyat yang memerintah daerah mereka sendiri (*self government*) (Putra, 2018). Pemikiran anarko sindikalisme berorientasi pada

menjaga kekuatan sosial yang kreatif sehingga perkembangan intelektual dan sosial berjalan baik (Rocker, 2017). Oleh karena itu, diperlukan adanya peranan dari intelektual progresif untuk memberikan pendidikan terutama kalangan pelajar agar tidak terasa digurui.

Aksi penggundulan tidak akan membuat jera. Hal ini didorong pernyataan Aan bahwa aktivis anarko sindikal yang digunduli bahkan terkena pukul, terlempar, dibawa ke kantor polisi, dan diinterogasi tidak akan jera justru bangga karena dapat diceritakan kepada juniornya. Namun demikian, dari massa aksi yang ikut-ikutan cenderung jera. Oleh karena itu, pendekatan moral melalui orang tua dan Dinas Pendidikan dapat efektif terutama kepada simpatisan anarko sindikal.

Strategi Pemulihan

Pemulihan dilakukan oleh berbagai elemen diantaranya kepolisian, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, institusi pendidikan, dan orang tua. dilakukan dengan bekerjasama dengan orang tua dan Dinas Pendidikan. Pemulihan adalah suatu kondisi untuk memulihkan kondisi yang terganggu agar kembali seperti keadaan normal. Kepolisian melakukan pendekatan moral. Kepolisian membebaskan peserta aksi yang dijemput orang tuanya sedangkan yang tidak dijemput diantarkan ke orang tua sekaligus sekaligus meminta dukungan orang tua untuk mengawasi anaknya. Selain itu, kepolisian juga mengirimkan data ke Dinas Pendidikan agar turut membantu kepolisian dalam membina dan mencegah pelajar agar tidak terlibat terpengaruh melakukan aksi anarkis. Anto memandang pendekatan melalui orang tua efektif karena dapat langsung melakukan penekanan kepada anak.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut melakukan upaya pemulihan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Ajengan Masuk Sekolah (AMS) untuk menangkal radikalisme. Sedangkan LSM menginisiasi pembuatan spanduk penolakan anarko untuk menjaga kondusifitas di Kota Bandung.

Pemerintah mengkonotasikan radikal terhadap paham anti-Pancasila. Sarana perjuangan bangsa bertumpu pada kekuatan rakyat yang dipersenjatai secara psikis (ideologi Pancasila) dan fisik (kemampuan bela negara yang tinggi) (Kementerian Pertahanan RI, 2014). Serikat pekerja/serikat buruh belum pernah mengikuti program bela



negara tetapi pendidikan terkait ideologi Pancasila dan Lemhannas (bagi pemimpin serikat pekerja/serikat buruh). Erry Gandana menyatakan bahwa penanaman nilai Pancasila penting dan perlu disesuaikan dengan arus globalisasi sehingga nilai kebudayaan dan kearifan lokal tidak luntur serta memiliki kebanggaan terhadap Indonesia. Oleh karena itu, program bela negara baik bagi buruh, pelajar, mahasiswa, maupun elemen masyarakat lainnya dapat menjadi salah satu senjata psikis pemerintah dalam lingkup pertahanan negara. Tujuannya adalah masyarakat yang tidak mudah terprovokasi dan turut membantu pemerintah dalam melawan paham anarko sindikalis.

Pendidikan moral dapat melalui pendidikan politik di tingkat sekolah. Dedi menyatakan bahwa pendidikan politik diperlukan agar siswa tidak mudah diprovokasi oleh kelompok/pribadi yang berkepentingan politik. Appridzani sebelumnya juga menyatakan bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi turut mendorong adanya persamaan pengetahuan antara siswa dan mahasiswa. Oleh karena itu, Fikri merekomendasikan adanya pelibatan intelektual progresif untuk melakukan kontra wacana dari dimensi psikologis lebih efektif untuk melakukan pendekatan dengan kalangan pelajar agar tidak terkesan digurui.

Pemerintah sudah memandang anarko sindikalis sebagai radikal. Aan menyatakan bahwa radikal dari perspektif pemerintah yaitu bertentangan dengan Pancasila. Wehr dan Bartos mengatakan bahwa solidaritas kelompok didorong oleh beroperasinya ideologi dalam kelompok, memberi doktrin, dan semangat perlawanan (Susan, 2014). Oleh karena itu, gerakan sosial seperti Forum Juang Tamansari Bandung, Aksi Kamisan, dan Pasar Gratis walaupun mengkritik negara penting untuk dikaji dan tidak bisa disamaratakan beraliran anarko sindikalis. Oleh karena itu, Fikri menyarankan perlu adanya pemetaan gerakan dan kelompok secara hati-hati dari sampai simpul terkecil (desa/kelurahan) melalui pelatihan dari akademisi bagi pegawai Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik), Kominda (Komunitas Intelijen Daerah), dan Bhabin (Pembinaan Ketertiban dan Keamanan).

Penyediaan layanan dasar berkaitan dengan *welfare state*. *Welfare state* adalah strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang memberi peranan besar kepada negara dalam



sistem jaminan sosial secara terencana, terlembaga, dan berkesinambungan. Fikri memandang bahwa penyediaan layanan dasar karena ormas atau kelompok seperti anarko memiliki kejelian dalam membaca ketidakhadiran negara dan isu-isu kesejahteraan di masyarakat sipil. Kondisi ini menjadi salah satu pendorong munculnya gerakan pasar gratis dengan slogan “negara tidak peduli, kita harus saling membantu”. Gerakan ini merupakan bentuk protes terhadap negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan ketimpangan sosial.

Kesimpulan, Rekomendasi, dan Batasan

Anarko sindikalis menggunakan pendekatan asimetris untuk menanamkan nilai-nilai ideologinya. Sasaran populasinya adalah pemuda, masyarakat perkotaan, dan rakyat terpinggirkan. Narasi anti-pemerintah dilakukan melalui media sosial, vandalisme, dan budaya tren (gaya modern) anak muda yang cair dan tidak ingin diatur. Selain itu, gerakan bersifat terorganisir dan mudah digiring oleh aktor berkepentingan khususnya isu yang menempatkan pada posisi bertentangan dengan negara.

Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan berbagai elemen diantaranya pemerintahan, masyarakat, TNI, Polrestabes Bandung dan orang tua. Tujuannya adalah menciptakan kondusifitas dan keamanan di Kota Bandung. Upaya yang dilakukan meliputi deteksi intelijen, preemtif, preventif, penegakkan hukum, dan pemulihan. Namun demikian, strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum efektif menghadapi gerakan anarko sindikalis yang liar, taktik berubah-ubah, dan terbentuknya simpatisan anarko sindikalis tidak terprediksi.

Daftar Pustaka

Adhey. (2019). *Kapolres Bandung: May Day Kondusif, Agar Orang Lain Menikmati Hari Libur*. Retrieved from Pojoksatu.id: <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2019/05/01/kapolres-bandung-may-day-kondusif-agar-orang-lain-menikmati-hari-libur/>



- Ali, As'ad. Said. (2013). *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi: Gerakan-Gerakan Sosial Politik dalam Tinjauan Ideologis*. Jakarta: LP3ES.
- Bappeda Provinsi Jawa Barat. (2019). *Ridwan Kamil Kukuhkan Pengurus LKS Tripartit Jabar 2018-2021*. Retrieved from <http://bappeda.jabarprov.go.id/>: <http://bappeda.jabarprov.go.id/ridwan-kamil-kukuhkan-pengurus-lks-tripartit-jabar-2018-2021/>
- Bappenas. (2011). *Bab 9 Pertahanan dan Keamanan*. Retrieved from Bappenas.go.id: https://www.bappenas.go.id/files/3513/5211/1083/bab-9-pertahanan-dan-keamanan__20111025152402__3351__9.pdf
- Bernie, Mohammad. (2019). *KontraS Laporkan Kekerasan Polisi Saat May Day ke Komnas HAM*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/kontras-laporkan-kekerasan-polisi-saat-may-day-ke-komnas-ham-dF9o>
- Cahyana, Budi. (2019). *Memahami Anarko-Sindikalis: Berdasarkan Penuturan Figur Sentral Gerakan dan Penjelasan dari Pengamat*. Retrieved from Harian Jogja: <https://news.harianjogja.com/read/2019/05/10/500/991178/memahami-anarko-sindikalis-berdasarkan-penuturan-figur-sentral-gerakan-penjelasan-dari-pengamat>
- Creswell, John W. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinillah, Mukhlis. (2019). *Jejak Vandalisme Massa 'Hitam-hitam' di Aksi May Day Bandung*. Retrieved from Detik.com: <https://news.detik.com/foto-news/d-4533123/jejak-vandalisme-massa-hitam-hitam-di-aksi-may-day-bandung/1>
- Fardiansyah, Achmad. (2016). *Kapan Unjuk Rasa Buruh Anarkis?* Retrieved from Oke News: <https://megapolitan.okezone.com/read/2016/04/29/338/1376045/kapan-unjuk-rasa-buruh-anarkis>
- Fisandra, Halida Bunga. (2019). *Polisi Dilaporkan Komnas HAM Terkait Kekerasan di Hari Buruh*. Retrieved from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1205703/polisi-dilaporkan-ke-komnas-ham-terkait-kekerasan-di-hari-buruh/full&view=ok>



- Hendropriyono, Abdullah Mahmud. (2021, January 6). FPI, CIA, dan Nasib Papua. (Alexander Sudrajat, Interviewer)
- Humas Bappeda Jabar. (2019). *May Day is a Creative Day*. Retrieved from Bappeda Provinsi Jawa Barat: <http://bappeda.jabarprov.go.id/may-day-is-a-creative-day/>
- Katoch, P. (2010). Asymmetric Warfare. In D. Singh, *Intelligence, Security, and Asymmetric Warfare* (pp. 93-104). New Delhi: Manas Publication.
- Kementerian Pertahanan RI. (2014). *Doktrin Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan RI*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Lazuardi, Iqbal Tawakal. (2019). *TEMPO.CO*. Retrieved from Mengintip Anarko Sindikalis yang Mencuat Setelah Hari Buruh: <https://fokus.tempo.co/read/1202387/mengintip-anarko-sindikalis-yang-mencuat-setelah-hari-buruh>
- Nainggolan, Robinsar. (2019). *Kelompok Anarko: Kami Bukan Pelaku Kriminal!* Retrieved from Law-Justice.co: <https://www.law-justice.co/artikel/67175/kelompok-anarko-kami-bukan-pelaku-kriminal/>
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Political Compass*. (n.d.). Retrieved from <https://knowyourmeme.com/photos/1614316-political-compass>
- Polrestabes Bandung. (2019). *Mengenal Anarko*. Bandung: Polrestabes Bandung.
- Pratiwi, Gita A. (2018). *Hari Buruh 2018, Ini Seruan Aksi Pekerja di Bandung dan Jakarta*. Retrieved from Pikiran Rakyat: <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01296543/hari-buruh-2018-ini-seruan-aksi-pekerja-di-bandung-dan-jakarta-423643>
- Pureklolon, Thomas Tokan. (2016). *Komunikasi Politik: Mempertahankan Integritas Akademisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.



- Puspita, Ratna. (2019). *Polri Petakan Kelompok Anarko Sindikalisme di Indonesia*. Retrieved from Republika.co.id: <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/19/05/02/pqva7f428-polri-petakan-kelompok-anarko-sindikalisme-di-indonesia>
- Putra, Bima Satria. (2018). *Peperangan yang Tidak akan Kita Menangkan: Anarkisme dan Sindikalisme dalam Pergerakan Kolonial hingga Revolusi Indonesia (1908-1948)*. Yogyakarta: CV Fajar Utama Offset.
- Rahmawati, Devi. (2019, Mei 4). Anarko Sindikalisme, Polisi Tetapkan 4 Tersangka (1). (Fristian Griec, Interviewer) Retrieved Juni 21, 2020, from https://www.youtube.com/watch?v=P3H2rvDb_iU
- Redaksi KSN. (2019). *GERAK – Bandung: Kita Semua Adalah Buruh!* Retrieved from ksn.or.id: <http://ksn.or.id/gerak-bandung-kita-semua-adalah-buruh/>
- Rocker, Rudolf. (2017). *Anarko Sindikalisme: Filsafat Radikal Kaum Pekerja*. Salatiga: Pabel.
- Ruang Bebas Uang. (2021). *Apa Itu Kolektif? dan Bagaimana Memulai Sebuah Kolektif?*. Retrieved from Instagram: @rbu.bekasi
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta,cv.
- Susan, Novri. (2014). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tempo.co. (2017). *Kelompok Berbaju Hitam Lakukan Perusakan saat May Day Bandung*. Retrieved from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/871254/kelompok-berbaju-hitam-lakukan-perusakan-saat-may-day-bandung/full&view=ok>
- Thornton, Rod. (2011). *Asymmetric Warfare: Threat and Response in The Twenty-First Century*. Malden: Polity Press.
- Tim Detik.com. (2019). *Tentang Anarcho-Syndicalism yang Gerakkan Massa Baju Hitam di Hari Buruh*. Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-4532993/tentang-anarcho-syndicalism-yang-gerakkan-massa-baju-hitam-di-hari-buruh>
- Tim Peneliti SMERU. (2002). *Hubungan Industrial di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya pada Era Kebebasan Berserikat*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Doktrin Pertahanan Negara

Wahyono, Edi (2020, Oktober 13). *Anarko Sindikalis dan Jejak Anarkisme di Indonesia*. Retrieved from Detik X: <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20201013/Anarko-Sindikalis-dan-Jejak-Anarkisme-di-Indonesia/>

Yarger, Harry R. (2006). *Strategic Theory for The 21st Century: The Little Book on Big Strategy*. United State: United State Government.

Zuhdan, Muhammad (2014). Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah "Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 272-290.